

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI PERMOHONAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL

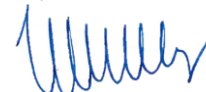
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	NOMOR SOP	SDM-309-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	18 Juli 2023
	TANGGAL REVISI	14 Mei 2024
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP. 196511281991031002
	NAMA SOP	USULAN KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI PERMOHONAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 4. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penatalaksanaan (business process); 5. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Tahun 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.	1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit masing-masing; 2. Memahami peraturan tentang organisasi dan tata kerja; 3. Memahami literatur tata naskah dinas.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1. SOP Penyusunan Jadwal Kegiatan, Asesor dan Tim Pendukung 2. SOP Undangan Rapat	1. Komputer/Printer 2. Alat Tulis 3. Peraturan Perundang-undangan 4. RKAKL/DIPA 5. Referensi	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses pelaksanaan penilaian kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM akan terhambat dan tidak berjalan optimal	Disimpan sebagai arsip dan dokumen	

NOMOR SOP	SDM-309-OT.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN	18 Juli 2023
TANGGAL REVISI	14 Mei 2024
TANGGAL EFEKTIF	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI PERMOHONAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	KETUA TIM KERJA PENYELENGGARAAN / JF MADYA	ADMIN PENILAIAN KOMPETENSI / JF MUDA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Usulan masing-masing Unit Eselon I atau Kantor Wilayah yang sudah di Verifikasi					Surat usulan kegiatan penilaian kompetensi	1 Hari	Surat	
2	memberikan arahan untuk menindaklanjuti dengan menyusun draft Jadwal, Asesor dan Tim Pendukung					Surat Usulan kegiatan penilaian kompetensi dan lembar disposisi	30 Menit	Surat	
3	Memberikan instruksi untuk menyusun draft Jadwal , Asesor, Tim Pendukung.					Surat Usulan kegiatan penilaian kompetensi dan lembar disposisi	30 Menit	Surat	
4	menyusun draft Jadwal , Asesor, Tim Pendukung.					Surat usulan kegiatan penilaian kompetensi , jadwal, asesor dan tim pendukung	120 Menit	Surat	

Mengetahui,
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi



NIP. 197405102000121001